



**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
FAKULTAS PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
JURUSAN MATA KULIAH UMUM**

**SILABUS
MATA KULIAH PENGEMBANGAN KEPERIBADIAN
PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN**

A. IDENTITAS MATA KULIAH

Nama Mata Kuliah	: MPK Pendidikan Kewarganegaraan
Nomor Kode	: KU 105
Jumlah SKS	: 2 SKS (100 menit)
Semester	: Kedua dan Ketiga
Kelompok Mata Kuliah	: MKU (Mata Kuliah Umum)/MPK
Jurusan/Program	: Semua Jurusan/S1 (Dik dan Nondik)
Prasyarat	: Tidak ada
Dosen	: TIM Dosen PKN UPI

B. Tujuan Umum MPK PKN

Setelah mengikuti perkuliahan ini mahasiswa diharapkan memiliki wawasan dan kesadaran kebangsaan yang tinggi, mampu bertindak cerdas, berwawasan global, berjiwa patriotik, berfikir komprehensif-integral dengan berlandaskan Falsafah Pancasila, UUD 1945, Wawasan Nusantara, dan Ketahanan Nasional untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional.

C. Deskripsi Isi MPK PKN

Dalam perkuliahan ini dibahas pengantar memahami matakuliah pengembangan kepribadian PKN (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi PKN), Pancasila sebagai filsafat, dasar negara dan ideologi nasional, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, HAM dan Hak dan Kewajiban WNI, Demokrasi dan Negara Hukum, Geopolitik

Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara, Geostrategi Indonesia dalam wujud Ketahanan Nasional.

D. Proses Pembelajaran

Pendekatan	: Ekspositori dan Inquiri
Metode	: Tanya Jawab, Diskusi, Pemecahan Masalah.
Tugas	: Evaluasi tiap Bahasan, Makalah, Presentasi dan Diskusi
Media	: OHP, LCD, Jurnal

E. Evaluasi

Nilai akhir (NA) mahasiswa pada mata kuliah ini terdiri atas:

1. Nilai Tugas dan partisipasi dalam diskusi dengan Bobot 20%
2. Nilai Kedisiplinan (termasuk kehadiran kuliah) dengan Bobot 10%
3. Nilai Ujian Tengah Semester (UTS) dengan Bobot 30%
4. Nilai Ujian Akhir Semester (UAS) dengan Bobot 40%

Nilai Akhir (NA) diperoleh dengan mengakumulasikan setiap nilai sesuai dengan Bobotnya.

Nilai Akhir (NA) yang berbentuk angka (0-100), kemudian dikonversikan kedalam huruf mutu A, B, C, D, atau E dengan menggunakan Sistem Penilaian Relatif (Gabungan PAP dan PAN).

F. Rincian Materi Perkuliahan Tiap Pertemuan

1. Pengantar Memahami MPK PKN di PT (Pertemuan ke-1)
2. Pancasila Sebagai Filsafat, Dasar Negaradan Ideologi Nasional (Pertemuan ke-2)
3. Identitas Nasional (Pertemuan ke-3)
4. Negara dan Konstitusi (pertemuan ke-4 dan 5)
5. HAM dan Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia (pertemuan ke-6 dan 7)
6. Ujian Tengah Semester (pertemuan ke-8)
7. Demokrasi dan Negara Hukum (pertemuan ke-9 dan 10)
8. Geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara (pertemuan ke- 11 dan 12)
9. Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara (pertemuan ke-13)
10. Geostrategi Indonesia dalam Wujud Ketahanan Nasional (pertemuan ke-14 dan

15)

11. Ujian Akhir Semester (pertemuan ke-16)

G. Daftar Literatur

1. Undang-undang Dasar 1945 pasca amandemen
2. Instrumen-instrumen HAM Nasional dan Internasional (PBB)
3. Muchtar K (1983), Hukum Laut Internasional, Bandung : PT Bina Cipta
4. Notonagoro (1980), Beberapa hal Mengenai Falsafah Pancasila, Pancuran Tujuh, Jakarta.
5. Tim Dikti & Lemhannas (2003), Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta: PT. Gramedia
6. Undang-undang No.20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
7. Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang POLRI
8. Undang-undang No.3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
9. Undang-undang No. 22 Tahun 1999 jo. UU No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
10. Buku-buku teks dalam dan luar negeri yang relevan dengan pokok bahasan, terutama yang dianjurkan oleh dosen di kelas masing-masing.

Catatan :

Silabus ini bersifat tentatif, karena akan disesuaikan dengan SK Dirjen Dikti tentang Perubahan Kurikulum Mata Kuliah PKn, yang diperkirakan akan terbit pada pertengahan juli.

1. Deskripsi Mata Kuliah Pendidikan Kewarganegaraan (KU 105)

(Untuk S.1, 2 SKS, Semester 2 dan 3, untuk D.2, D.3 Semester 1)

Mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini merupakan salah satu bagian dari mata kuliah pengembangan kepribadian (MKPK) yang sudah berjalan sejak dekade 80-an (dulu Kewiraan). Namun berdasarkan Kurikulum UPI 2006, dimana salah satu mata kuliah pengembangan kepribadian dihilangkan yaitu MK Pendidikan Pancasila yang merupakan prerequisit dari PKn, maka mata kuliah PKn (baru) ini akan memiliki nuansa berbeda terutama dilihat dari tujuan, topik-topik bahasan, evaluasi, maupun referensinya.

Mata Kuliah PKn (baru) ini memusatkan perhatian pada pengembangan warga negara yang cerdas, demokratis, memiliki rasa kebangsaan yang tinggi, berwawasan global, berjiwa patriotic (cinta tanah air), dan religius, mampu berfikir komprehensif integral dalam membina dan mewujudkan cita-cita dan tujuan nasional dengan berdasarkan Falsafah Pancasila dan kesadaran Berkonstitusi UUD 1945. Dalam perkuliahan ini dibahas pengantar memahami matakuliah pengembangan kepribadian PKN (Landasan filosofis, historis, Visi, Misi, Tujuan, Kompetensi PKN), Pancasila sebagai filsafat, dasar negara dan ideologi nasional, Identitas Nasional, Negara dan Konstitusi, HAM dan Hak dan Kewajiban WNI, Demokrasi dan Negara Hukum, Geopolitik Indonesia dalam wujud Wawasan Nusantara, Sistem Penyelenggaraan Organisasi Negara, Geostrategi Indonesia dalam wujud Ketahanan Nasional.

Perkuliahan PKn juga akan mengkaji isu-isu actual yang relevan dengan topik-topik bahasan, dimana para mahasiswa diminta mencari solusi dengan menggunakan berfikir komprehensif-integral. Pelaksanaan perkuliahan menggunakan pendekatan ekspositori melalui ceramah dan Tanya jawab, dengan menggunakan media LCD, OHP, dan media lain yang tersedia. Disamping itu juga menggunakan pendekatan inkuiri yaitu penyelesaian tugas, penyusunan, dan penyajian makalah, serta diskusi.

Evaluasi PKn dilakukan selain dalam bentuk UTS dan UAS, juga penilaian selma PBM baik sewaktu diskusi dan penyajian makalah, serta kedisiplinan mahasiswa selama mengikuti perkuliahan.

Buku sumber utama yang digunakan adalah : UUD 1945 Pasca Amandemen, Beberapa hal mengenai Filsafat Pancasila (Notonagoro,1980), Instrumen-instrumen HAM Nasional dan Internasional (PBB), Hukum Laut Internasional (Mughtar K, 1985), PKn (Dikti & Lemhannas,2005), UU Sisdiknas, UU Otonomi Daerah, UU Pertahanan Negara, UU POLRI.

